

Literasi Politik Pemilih Muda di Kalangan Mahasiswa

Mikhael Rajamuda Bataona¹, Yoseph Riang¹, Donna Isra Silaban¹,
Emanuel Sowe Leuape^{2,*}

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Widya Mandira, Kupang

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana, Kupang

*Penulis korespondensi: blondaeman28@gmail.com

Dikirim : 11 Januari 2026

Direvisi : 29 Maret 2026

Diterima : 30 Maret 2026

Abstrak: Mahasiswa memiliki peran yang cukup strategis dalam dinamika politik di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pemilih muda mencakup hampir setengah dari keseluruhan pemilih. Namun demikian, keterlibatan politik mereka masih tergolong minim karena sebagian besar baru pertama kali berpartisipasi dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu dibekali pemahaman dan keterampilan politik yang memadai agar mampu menentukan sikap serta pilihan politik secara rasional dan bijaksana. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Nusa Cendana. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pelatihan bertema literasi politik. Adapun tujuan pelatihan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman politik mahasiswa, dan (2) memberikan panduan kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai kandidat politik secara objektif. Pelatihan ini telah dilaksanakan dengan baik dan dinilai efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil evaluasi yang mengindikasikan adanya peningkatan kompetensi politik peserta serta respon positif terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Materi literasi politik yang disampaikan diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi peserta, khususnya dalam mempertimbangkan pilihan politik saat menentukan pemimpin di masa depan.

Kata Kunci: Kupang, literasi, mahasiswa, pemilih, politik

Abstract: Students hold a relatively important position in Indonesian politics. Statistics show that young voters make up half of the total electorate. However, their political experience is very limited, considering that they are just beginning to participate in political elections. Therefore, students, as young voters, need to be equipped with adequate political skills so they can make informed and wise political decisions. This is a problem currently faced by students in the Communication Studies Program at Nusa Cendana University. This community service activity seeks to address the issues experienced by partners by scheduling a training activity entitled Political Literacy. The objectives of this training activity are: 1) to equip partner students with political knowledge and 2) to equip students with various key criteria that can be used as benchmarks in validly assessing political candidates. This training has been implemented well and effectively based on the results of the activity evaluation, which showed an increase in the participants' political competence and a positive impression of the entire series of activities. The substance of this political literacy training should be a useful reference for participants, especially regarding political considerations in choosing future leaders.

Keywords: Kupang, literacy, politic, student, voter

1. Pendahuluan

Posisi kaum muda dalam pemilihan umum cukup diperhitungkan berdasarkan pengalaman partisipasi politik mereka yang signifikan dalam 2 dekade belakangan. Tren keterlibatan kaum muda terus mengalami peningkatan dari tiap periode pemilihan politik di Indonesia. Rekap BPS Indonesia (2024) menunjukkan jumlah pemilih muda dalam periode pemilihan 2009 sebesar 30%. Angka ini meningkat 40% di periode pemilihan 2014 dan menjadi 50% total pemilih muda di tahun 2019. Sementara keberadaan pemilih muda dalam periode pemilihan 2024 mencapai 55% dari total pemilih dan berpotensi mengalami eskalasi jumlah pada periode pemilihan politik mendatang. Secara teknis, keterlibatan kaum muda dalam pemilihan politik dipandang sebagai hak sekaligus kewajiban mereka selaku warga negara sebagaimana amanat konstitusi. Statistik menunjukkan potensi keikutsertaan kaum muda dalam kontestasi politik sangat potensial dan bahkan menjadi variabel penentu suksesi politik (Khakim, 2023).

Kalkulasi angka partisipasi politik kaum muda di Indonesia terbilang tinggi, tetapi ada problem signifikan terkait kualitas keterlibatan mereka yang seringkali dinilai dangkal, rentan terhadap disinformasi, dan terfokus pada momen elektoral saja (Halimatusa'diyah & Prihatini, 2021). Persoalan ini kurang lebih dialami oleh mitra, terutama kelompok mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana. Sebagian besar mereka baru sekali mengikuti pemilihan umum yang digelar 2024 silam. Mereka mengakui harus memilih karena warisan kebiasaan orangtua, menjalankan hak dan kewajiban selaku warga negara, *FOMO* tren politik, digerakkan sentiment primordialisme, dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan dalil partisipasi politik mereka digerakkan oleh kebiasaan alih-alih datang dari pertimbangan politik yang matang. Pilihan politik seyogianya dilandasi oleh dalil-dalil yang jitu sehingga melahirkan pemimpin politik yang berintegritas dan kompeten (Valgarðsson *et al.*, 2025).

Kelompok mitra sebenarnya punya penetrasi wawasan politik yang baik secara teoretis karena diajarkan di kampus. Namun, minim pengetahuan terkait realitas politik (nasional maupun lokal) serta analisis praktisnya. Di antaranya mereka mengakui sulit menelaah *profiling* kandidat politik yang bakal dipilihnya. Mitra terkendala oleh kriteria / perspektif utama yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi figur politik dan membuat evaluasi perbandingan sebelum membuat pilihannya. Pengetahuan yang mereka pelajari di bangku perkuliahan sebagian besar berbeda dengan praktik politik di lapangan. Secara konseptual maupun teoretis, wawasan politik dalam ilmu pengetahuan merepresentasikan idealisme politik yang justru berbeda temuannya dalam praktik politik, sehingga mereka perlu menginternalisasi informasi terkait realitas empirik peristiwa / fenomena politik sebagai

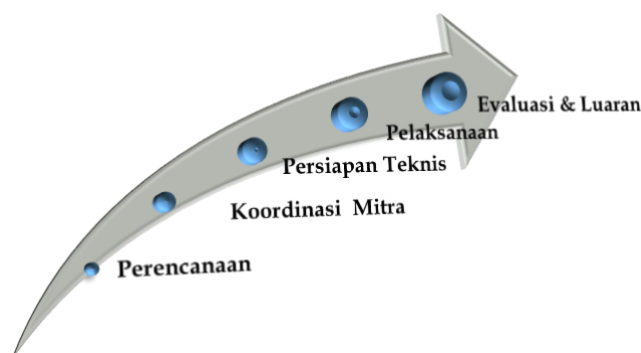
referensi tambahan guna membuat pertimbangan maupun menentukan sikap politiknya (Millán, 2022). Dengan demikian, perpaduan pengetahuan ilmiah, wawasan politik praktis, serta analisis menjadi bekal bagi mitra untuk mampu menghasilkan keputusan politik secara matang dan mandiri. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai modalitas politik kelompok mitra dalam berbagai bentuk partisipasi politik lainnya selain dalam konteks pemilihan politik tahunan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi kelompok mitra, kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada dua prioritas utama. Pertama, mitra belum memiliki kompetensi politik yang memadai, khususnya dalam pemahaman politik praktis yang mencakup realitas politik nasional maupun lokal (NTT). Mereka membutuhkan proses internalisasi informasi terkait fenomena dan realitas empirik peristiwa politik. Oleh karena itu, pelatihan literasi politik ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan politik yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun pertimbangan serta mengambil keputusan politik secara matang dan mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam politik praktis sehingga mampu memberikan pemahaman berbasis realitas empiris. Kedua, mitra juga belum memiliki panduan dasar dalam melakukan analisis terhadap praktik politik, terutama dalam menilai figur-figur politik. Selama ini, penilaian yang dilakukan cenderung terbatas pada aspek visual kampanye tanpa disertai analisis mendalam terhadap rekam jejak dan capaian kandidat secara komprehensif. Oleh sebab itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kriteria-kriteria utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kandidat politik secara objektif dan valid. Narasumber yang dilibatkan memiliki pengalaman dalam melakukan analisis politik praktis di berbagai forum seperti seminar, diskusi, dan media massa, sehingga mampu menjawab kebutuhan mitra secara relevan.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung dari Juli – Desember 2025 dimulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi kegiatan seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. Kegiatan pelatihan ini berlangsung pada Sabtu, 29 November 2025 bertempat di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana. Peserta kegiatan terdiri dari 35 mahasiswa setempat, 20 orang Semester III dan 15 orang Semester V. Kegiatan dibuka secara resmi oleh pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana sekaligus berperan mendampingi peserta selama pelatihan berlangsung.

Pelatihan ini disusun dalam dua sesi utama. Sesi pertama berupa kombinasi presentasi dan diskusi yang difasilitasi oleh narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Metode presentasi digunakan sebagai sarana diseminasi pengetahuan atau informasi melalui komunikasi lisan yang didukung oleh media visual tertentu (Sartika dkk., 2024), sementara metode diskusi bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta melalui interaksi aktif antara fasilitator dan peserta, baik dalam bentuk tanya jawab maupun penyampaian pendapat (Ruslandi dkk., 2025). Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan penyerapan materi oleh peserta. Evaluasi dilakukan menggunakan desain *Pretest–Post-test* Kelompok Tunggal (*One-Group Pretest-Post-test Design*), yaitu pengukuran yang dilakukan sebelum dan setelah pelatihan berlangsung. Hasil dari kedua pengukuran tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik perbandingan individual (*Individualizing Comparison*) guna mengetahui tingkat peningkatan kompetensi peserta (Abdillah *et al.*, 2021). Proses *pretest* dan *post-test* dilaksanakan secara daring melalui Google Form yang diisi langsung oleh peserta.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

3. Hasil dan Diskusi

Hasil kegiatan pelatihan Literasi Politik Bagi Pemilih Muda di kalangan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana telah terlaksana dengan baik dan efektif. Dalam sambutannya, pihak mitra mengapresiasi kegiatan pelatihan literasi politik ini sangat relevan karena ditujukan bagi mahasiswa setempat selaku pemilih muda. Kegiatan pelatihan literasi politik ini difasilitasi oleh Mikhael Rajamuda Bataona, akademisi cum pengamat komunikasi politik yang memulai materi pelatihan dengan ulasan ontologi politik sebagai wawasan filosofis yang perlu diterangkan kepada peserta selaku orang muda. Substansi ini bermaksud memberikan basis pemahaman bagi mahasiswa terkait esensi dari aktivitas

politik itu sendiri. Menurutnya, esensi penyelenggaraan politik dapat dilihat dari 5 entitas pokok, yaitu: *Pertama*, negara (*state*) yang lahir dari kontrak sosial di antara masyarakat yang berperan mengatur kehidupan bersama secara baik dan tertib (Linderborg, 2024). Sebelumnya, umat manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang cenderung berkonflik guna memperebutkan sumber daya tertentu. Selanjutnya, manusia memutuskan untuk berunding dan bersepakat hidup berdampingan di bawah satu kepemimpinan dan regulasi yang menjamin ketertiban sosial serta distribusi sumber daya bagi kesejahteraan bersama. Di dalamnya, hak dan kewajiban tiap warga negara diatur secara baik guna menjamin kehidupan sosial yang adil (Gearty, 2025). Substansi ontologi ini ternyata sudah dipahami oleh beberapa peserta kegiatan yang mendefinisikan negara sebagai penyelenggaraan kehidupan bersama dengan katalisator kekuasaan dan regulasi. Dokumentasi presentasi dari narasumber diberikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Presentasi Narasumber

Kedua, kekuasaan (*power*) yang menjadi sumber daya utama dalam penyelenggaraan politik. Pemilihan politik bagian dari ritus tahunan yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpinnya. Pemimpin punya fungsi pengorganisasian, koordinasi, serta memfasilitasi penyelenggaraan kehidupan bersama yang dijalankan melalui kekuasaan. Kekuasaan dimaksud berupa kewenangan atau otoritas untuk mengatur kehidupan bernegara dalam berbagai kepentingan, seperti pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, supremasi hukum, menjamin ketertiban, dan sebagainya (Salsabilah & Putri, 2022). Sebagai mana tesis Lord Acton: '*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*', kekuasaan punya potensi destruktif bilamana tidak dikontrol. Kekuasaan politik yang tidak dibatasi cenderung melahirkan kesewenang-wenangan dalam kepemimpinan (Jurkiewicz & Brown, 2000). Sebagian peserta mengasosiasikan politik identik dengan kekuasaan yang bengis tanpa paham esensi dari kekuasaan itu sendiri. Lantas narasumber menekankan partisipasi politik kaum muda dilihat dalam dua kepentingan, yaitu keterlibatan politik bagian dari fungsi *check*

and balance yang mampu meredam penggunaan kekuasaan oleh pemimpin secara berlebihan dan partisipasi politik kaum muda merepresentasikan pengorganisasian kapital kekuasaan warga negara dalam bentuk hak-hak sipil. Tipifikasi kekuasaan bisa dalam bentuk dominasi dimana kepatuhan datang dari ancaman fisik, tetapi juga dalam wujud hegemoni dimana kepatuhan justru datang dari kesadaran subjek sendiri (Femia, 1987).

Ketiga, politik juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam negara demokrasi sebagaimana Indonesia, pengambilan kebijakan politik oleh pemimpin idealnya diatur melalui prosedur yang adil. Hal ini bermaksud menjamin segenap aktivitas pengambilan keputusan politik berpihak pada kepentingan bersama (Asrinaldi, 2025). Sebagian peserta kegiatan hanya mengenal voting sebagai skema pengambilan keputusan politik. Salah satunya yang paling diketahui berupa pemilihan politik yang menekankan akumulasi suara. Pengambilan keputusan politik tidak selalu melalui pemungutan suara, tetapi dapat berupa peraduan argumentasi via diskusi. Pertama disebut sebagai demokrasi prosedural, sementara yang lainnya dikenal sebagai demokrasi deliberatif. Sebelumnya, ruang-ruang politik fisik membatasi interaksi dan diskusi politik di antara warga negara, tetapi kehadiran media sosial mempermudah pertemuan dan interaksi politik. Sebagai *digital native*, kaum muda mampu menyelenggarakan demokrasi deliberatif melalui ruang-ruang virtual yang ada. Kaum muda dapat leluasa menyampaikan pendapat dan beradu argumen sebelum menentukan sikap politiknya (Turahmi dkk., 2025). Modernisasi politik diprakarsai terutama oleh kehadiran teknologi komunikasi sebagai katalisatornya.

Keempat, kebijakan umum (*public policy*) sebagai manifestasi keputusan politik yang diambil oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan publik, di antaranya program kerja, regulasi (undang-undang), tindakan, alokasi sumber daya, dan sebagainya. Peserta kegiatan mengkonfirmasi pemahaman mereka terkait kebijakan sebagai produk dari politik dengan minim wawasan terkait dinamika pengambilan kebijakan itu sendiri. Narasumber mencontohkan kebijakan publik terkait penanganan krisis bencana alam dapat diputuskan sesegera mungkin dengan konsekuensi melangkahi tahapan / prosedurnya. Sebaliknya, alokasi bantuan sosial untuk kesejahteraan rakyat memang urgen di tengah krisis ekonomi tetapi tidak lebih penting dari prosedur realisasinya karena berpotensi menimbulkan maladministrasi dan pidana. Kebijakan publik perlu diambil dengan mendengarkan aspirasi semua pihak terkait, terutama masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan. Ini sekaligus mengeliminir niat politik jahat dari pengambil kebijakan yang menguntungkan pribadi (Saguin, 2025).

Kelima, Indonesia lebih condong ke sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) alih-alih pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Tiga pilar utama negara terdiri dari Eksekutif (pemerintah/birokrasi), Legislatif (Perwakilan Rakyat/Senator), dan Yudikatif (Aparat Penegak Hukum) yang disebut *trias politica* dalam konteks negara republik (Siallagan, 2015). Implementasi kedua sistem alokasi kekuasaan ini memengaruhi hubungan ketiga pilar yang ada. Dalam *distribution of power*, sentra kekuasaan terpusat pada pihak eksekutif, terutama pada presiden selaku simbol negara. Sistem ini memungkinkan intervensi eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi legislatif dan yudikatif. Di Indonesia, jamak terjadi keputusan hukum yang tidak adil justru bersumber dari kepentingan politik pemimpin negara. Sebaliknya, presiden Indonesia punya hak istimewa (grasi / abolisi) membebaskan narapidana yang telah diputuskan bersalah oleh yudikatif. Kondisi ini agak berbeda di Amerika yang menganut sistem pemisahan kekuasaan yang menjamin kedaulatan ketiga pilar kekuasaan. Presiden Amerika bisa disomasi legislatif atau dipidanakan oleh yudikatif yang mustahil terjadi dalam kultur politik di Indonesia.

Tabel 1. Kriteria Memilih Pemimpin Politik

No	Variabel	Pretest	Post-test
1	Jujur & Tidak Korupsi	64%	66,7%
2	Tegas & Berwibawa	8%	0
3	Rekam Jejak Prestasi & Integritas	16%	16,7%
4	Pengalaman Memimpin	8%	11,1%

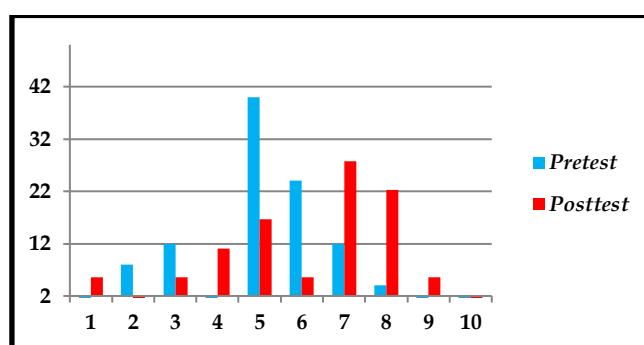
Tabel 1 menunjukkan peserta selaku anak muda memiliki konsen besar terhadap persoalan korupsi. Pemimpin yang jujur dan tidak korupsi menjadi kriteria utama mereka dalam menentukan sikap politiknya. Kepedulian tersebut ditindaklanjuti tidak hanya dalam pemilihan politik, tetapi juga disuarakan dalam aktivitas politik mereka sehari-hari, di antaranya memberikan edukasi kepada masyarakat, mengontrol supremasi hukum terhadap korupsi, dan terpenting membiasakan sikap jujur dalam keseharian hidupnya. Selanjutnya, narasumber menyoroti realitas politik di NTT dengan merujuk pada hasil kajian politik lokal, terutama berkaitan dengan pemilihan politik. Narasumber memaparkan tiga kajian terkait politik lokal di NTT yang menjadi dasar analisis dalam pelatihan. Pertama, penelitian berjudul “Relasi Kuasa dan Simbol-Simbol Ekonomi-Politik Gereja Dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi NTT” (Bataona & Bajari, 2017) mengungkap adanya pertukaran kepentingan antara tokoh agama dan politisi dalam proses kontestasi politik. Relasi ini berlangsung secara simbolik, namun terbukti efektif dalam memobilisasi dukungan pemilih, dengan tiga faktor utama yang

memengaruhi elektabilitas, yaitu suku, agama, dan uang. Kedua, penelitian “The Affinity of Local Political Branding Toward the Distinction of Constituent Taste in NTT” (Bataona *et al.*, 2025b) mengkaji preferensi pemilih lokal serta kaitannya dengan strategi *branding* politik kandidat. Hasilnya menunjukkan bahwa “selera” pemilih di NTT cenderung mengarah pada tiga kriteria utama, yakni pemimpin yang memiliki kapital sosial-politik dan mampu menyatukan perbedaan, figur muda yang energik, serta kandidat yang merepresentasikan identitas sosial tertentu. Ketiga, penelitian “Komunikasi Politik Penempatan Kapital Dalam Pemilihan Gubernur NTT 2024” (Bataona *et al.*, 2025a) membahas bagaimana berbagai bentuk kapital politik didistribusikan pada segmen pemilih yang berbeda, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah, yang masing-masing memanfaatkan modal politiknya selama proses kontestasi berlangsung. Berdasarkan ketiga kajian tersebut, narasumber menekankan bahwa konfigurasi politik lokal di NTT dapat dipahami melalui analisis variabel-variabel yang memengaruhinya. Ia juga menegaskan bahwa analisis politik oleh kalangan muda akan lebih tepat apabila didukung oleh kombinasi wawasan teoretis dan pengalaman empirik, sehingga mampu menjadi dasar dalam menentukan sikap politik secara rasional.

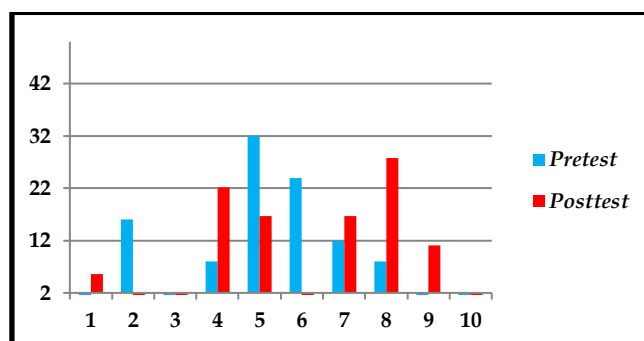
Agenda pelatihan dilanjutkan dengan pendalaman substansi presentasi melalui diskusi / tanya-jawab seperti diperlihatkan dalam Gambar 3. Sementara itu, sajian diagram hasil *pre-test* dan *post-test* dalam Gambar 4 dan 5 mengkonfirmasi adanya peningkatan kompetensi peserta baik dalam aspek teoretis maupun empiris usai mengikuti kegiatan pelatihan. Kriterianya semakin tinggi skor angka (1-10) maka semakin tinggi pula kompetensinya (1-100%). Kompetensi teoretis tertinggi peserta berada di skor 5 dengan persentase 40% sebelum mengikuti kegiatan. Setelah mengikuti pelatihan ini, kompetensi teoretis tertinggi peserta berada di skor 7 dengan persentase 27,8% menandai adanya peningkatan kecakapan. Dalam *pretest*, hanya terdapat 6 skor yang dipilih, tetapi pada *post-test* ada penambahan menjadi 8 skor yang dipilih peserta mengindikasikan penetrasi kompetensi baru yang diperoleh peserta. Demikian juga kompetensi empiris politik peserta mengalami peningkatan dengan persentase tertinggi 27,8% berada pada skor 8 usai agenda pelatihan. Statistik ini meningkat dari hasil *pretest* di mana persentase tertinggi 32% hanya berada di skor 5. Bahkan 11,1% peserta mengakui tingkat kompetensi mencapai skor 9 mengindikasikan adanya kemajuan kecakapan politiknya.



Gambar 3. Sesi Tanya-Jawab



Gambar 4. Kompetensi Teoretis Politik Peserta



Gambar 5. Kompetensi Empiris Politik Peserta

Sesi pelatihan dilanjutkan dengan praktikum kelas yang langsung dipandu oleh panitia. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok beranggotakan 6-7 orang. Tiap kelompok diinstruksikan membuat *profiling* satu politisi lokal maupun nasional, terutama politisi muda, dengan mendeskripsi identitas pribadi, riwayat pendidikan, profesi, keanggotaan organisasi politik, rekam jejak prestasi, keunikan dan kelebihan figur, dan saran. Pilihan figur politik muda dimaksud sudah ditentukan oleh panitia sebelumnya, di antaranya Gibran Rakabuming Raka, Verrel Bramasta, Serena Cosgrova Francis, Aurum Obe Titu Eki, dan Juventus Prima Yoris

Kago. Tiap kelompok dibagikan peralatan tulis dan kertas karton yang sudah ditempelkan foto kelima politisi muda. Kelompok diminta mencari referensi terkait figur politik dan menuliskan deskripsinya pada kertas karton selama 35 menit, kemudian masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan figur politik yang diperolehnya di forum kegiatan pelatihan seperti diperlihatkan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Presentasi Hasil Kerja Kelompok

Praktik kerja ini bertujuan melatih kompetensi peserta dalam menelaah figur politisi secara detail dan komprehensif. *Profiling* politisi sangat dibutuhkan sebagai referensi bagi pemilih muda sebelum menentukan sikap dan pilihan politiknya. Demokrasi menjamin hak tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pilihan politik, tetapi kebebasan itu perlu dilengkapi dengan kompetensi politik yang baik sehingga tidak salah memilih pemimpin (Firdaus et al., 2024). Usai agenda unjuk-kerja, kegiatan pelatihan ini ditutup dengan kegiatan penempelan *wishing tree* di mana mahasiswa menuliskan pendapat, saran, dan kritiknya terhadap realitas politik nasional maupun lokal pada *sticky note* lalu ditempelkan pada wadah kertas yang telah disiapkan panitia. Secara umum, penyelenggaraan kegiatan pelatihan literasi politik ini juga memperoleh evaluasi yang positif dari peserta. Sebagai *closing statement*, narasumber mengapresiasi peserta yang aktif dan antusias selama mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan pelatihan seperti direkapitulasi dalam Tabel 2, doa penutup, penyerahan piagam, foto bersama, dan makan siang.

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

No	Kriteria Penilaian	Ukuran	Persentase Penilaian
1	Relevansi Tema Pelatihan	Sangat Bermanfaat	66,7%
		Bermanfaat	33,3%
2	Substansi Kegiatan Pelatihan	Sangat Baik	72,2%
		Baik	22,2%
3	Pelayanan Panitia	Sangat Responsif	88,9%
		Responsif	11,1%

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan literasi politik ini telah terlaksana dengan baik, lancar, dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana sebagai mitra. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama berupa penyampaian materi oleh narasumber yang memiliki kompetensi di bidang Komunikasi Politik, dengan tujuan meningkatkan kapasitas politik peserta melalui pengayaan wawasan, baik secara teoretis maupun empiris. Dalam sesi ini, narasumber memaparkan berbagai dinamika politik nasional dan lokal di NTT yang didukung oleh data survei serta hasil penelitian yang relevan. Sesi kedua merupakan kegiatan praktik, di mana peserta diminta menyusun profil politisi muda dan mempresentasikannya dalam forum. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan analisis peserta dalam menelaah rekam jejak dan karakter politisi sebelum menentukan pilihan politik. Diharapkan, praktik tersebut dapat menjadi kebiasaan positif bagi generasi muda dalam berpartisipasi secara lebih kritis dan rasional dalam proses politik.

Secara umum, kegiatan ini berlangsung dengan baik dan efektif berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan panitia. Peserta terlihat aktif dan antusias selama berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Pihak mitra sendiri mengapresiasi kegiatan pelatihan literasi politik ini karena dipandang relevan dengan kebutuhan mahasiswa setempat. Substansi pelatihan dapat menjadi bekal kecakapan politik bagi mahasiswa dalam partisipasi politiknya, terutama kompetensi mereka dalam menentukan sikap dan pilihan pada kontestasi politik di masa mendatang. Tim pengabdian juga berharap kerjasama awal ini dapat dijangkau kembali dalam kegiatan sejenis dengan substansi pelatihan yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Mandira Kupang yang telah memberikan dukungan secara finansial sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada mitra Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana Kupang atas sambutan, kerja sama dan partisipasi secara aktif dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini.

Daftar Referensi

Abdillah, L.A., Sufyati, Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S.D., Wulandari, W., Prasetyo,

- A.H., Sinambela, S., Mansur, M., Aulia, T.Z., Hamzah, A., Firmansyah, H., Andari, S., Rismadi, B., Purba, S., Gazi, G. & Sina, I. (2021). Metode Penelitian & Analisis Data Comprehensive. *Penerbit Insania*.
- Amin, F., Swarizona, S., Kuncahyo, T., Arafat, Y. & Oktarina, R.A. (2023). Digital Democracy Political Participation Through Technology in the Modern Era, *International Journal of Science and Society*, 5(4), 291–301. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i4.786>.
- Asrinaldi. (2025). Government domination in policy making in the House of Representatives during the President Jokowi era. *Asian Journal of Comparative Politics*, 10(3), 272–285. <https://doi.org/10.1177/20578911251326136>.
- Bataona, M.R., Riang, Y., Silaban, D.I., Leuape, E.S. & Nggili, A.L.H. (2025a). Political Communication of The Capital Placement in NTT Gubernatorial Election. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 13(2), 386–407. <https://doi.org/10.24198/jkk.v13i2.66469>.
- Bataona, M.R., Silaban, D.I., Riang, Y., Leuape, E.S., & Vaz, B.L. (2025b). The Affinity of Local Political Branding Toward The Distinction of Constituent Taste in NTT. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 93–116. <https://doi.org/10.15575/cjik.v9i1.45376>
- Bataona, M.R. & Bajari, A. (2017). Relasi Kuasa Dan Simbol Ekonomi-Politik Gereja Dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi NTT, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 121–135. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i2.8831>.
- BPS. (2025). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka*. Kupang.
- Çiçekli, A. (2025) ‘Youth, Political Participation, and Awareness: An Empirical Study on University Students’ Political Sensitivity’, *Hitit Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), pp. 468–483. Available at: <https://doi.org/10.17218/hititsbd.1711401>.
- Femia, J.V. (1987). 'Evaluation and Conclusion' in *Gramsci's Political Thought*. Oxford University Press, 217–255. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198275435.003.0007>.
- Firdaus, F.R., Chandra, R.L. & Sagala, C.S.T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 337–357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>.
- Gearty, C. (2025). Recovering the good life: enhancing the underlying political determinants for social rights enjoyment in the UK, *King's Law Journal*, 36(2), 251–270. <https://doi.org/10.1080/09615768.2025.2547474>.
- Halimatusa'diyah, L. & Prihatini, E. (2021). Young voters and political participation in Indonesia: Revisiting a marriage gap, *Social Science Quarterly*, 102(6), 2552–2564. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13024>.
- Jurkiewicz, C.L. & Brown, R.G. (2000). Power Does Not Corrupt Absolutely: An Empirical Study, *Public Integrity*, 2(3), 195–210. <https://doi.org/10.1080/15580989.2000.11770833>.

- Khakim, M.S. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>
- Linderborg, O.H. (2024). Tracing the Roots of Social Contract Theories: A Comparative Study of Ancient Greek and Indian Perspectives, *Global Intellectual History*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/23801883.2024.2411053>.
- Millán, R. (2022). The Importance of Ideas in Institutional Change and Political Processes, *Opinião Pública*, 28(1), 1–32. <https://doi.org/10.1590/1807-019120222811>.
- Ruslandi, U., Qomariyah, S. & Sumitra, M. (2025). Peran Metode Pembelajaran Diskusi dalam Menciptakan Keaktifan Belajar Siswa di MAS Tarbiyatul Islamiyah, *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(1), 79–90. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i1.1203>.
- Saguin, K. (2025). Bypassing clientelism through policy design: generating intelligence for effective social policies, *Policy and Society*, 44(2), 200–217. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puaf015>.
- Salsabilah, W. & Putri, R.Y. (2022). Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2133>.
- Sartika, E.M., Pasaribu, N.T.B., Setiadarunia, D., Jarden, J.J., Saragih, R.A., Yusuf, H., & Moses, E. (2024). Peningkatan Kemampuan Pembuatan Presentasi Menggunakan Generative AI Bagi Guru-Guru Di BPPK Bandung, *Jurnal Atma Inovasia*, 4(5), 183–189. <https://doi.org/10.24002/jai.v4i5.9400>.
- Siallagan, H. (2015). Problematics on Separation of Powers Theory Implementatio, *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(3), 324–330. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.415>.
- Turahmi, H., Azizah, Z. & Mutia, C.E. (2025). Peran Pemuda dalam Mewujudkan Demokrasi Digital: Analisis Praktik Komunikasi Politik di Media Sosial, *Sagita Academia Journal*, 3(4), 106–113. <https://doi.org/10.61579/sagita.v3i4.703>.
- Valgarðsson, V., Jennings, W., Stoker, G., McKay, L., Devine, D., & Clarke, N. (2025). The Good Politician: Competence, Integrity and Authenticity in Seven Democracies. *Political Studies*, 73(2), 631–656. <https://doi.org/10.1177/00323217241261180>